

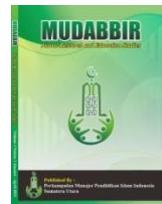


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Pemberitaan Hoaks Politik di Youtube Redaksi TV Terhadap Opini Publik pada Pemilu 2024

Amanda Zahra Sofiyani Ashsiddiqie¹, Deswinta Asnurifa²,
Muhammad Naufal Annabil³, Muhammad Aditya Hasbullah⁴, Pia Khoirotun Nisa⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: amanda.zahra22@mhs.uinjkt.ac.id¹, deswinta.asnurifa22@mhs.uinjkt.ac.id²,
naufal.annabil22@mhs.uinjkt.ac.id³, aditya.hasbullah22@mhs.uinjkt.ac.id⁴,
pia.khoirotun@uinjkt.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberitaan hoaks politik di kanal YouTube Redaksi TV terhadap opini publik menjelang Pemilu Presiden 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis interpretatif, didukung oleh wawancara, observasi konten video, dan dokumentasi. Objek penelitian difokuskan pada video berjudul "Perhitungan di Stop KPU dan Istana Kalang Kabut, Kecurangan Terbongkar" yang ditayangkan di kanal Redaksi TV, serta tanggapan dari penonton dalam bentuk komentar dan interaksi digital lainnya. Temuan menunjukkan bahwa video tersebut termasuk *fabricated content* yang menyebarkan disinformasi secara visual dan emosional, yang berpengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik. Banyak komentar menunjukkan respons emosional berupa ketidakpercayaan terhadap KPU dan Bawaslu, serta munculnya tuntutan ekstrem seperti pembubaran pemilu. Fenomena ini dijelaskan melalui teori *Spiral of Silence* yang menunjukkan bahwa dominasi narasi hoaks dapat membuat opini kritis tenggelam. Penelitian ini menegaskan bahwa hoaks politik di YouTube tidak hanya mengganggu kualitas informasi, tetapi juga berperan dalam memanipulasi persepsi publik dan membahayakan demokrasi digital.

Kata Kunci: Hoaks Politik, Opini Publik, Pemilu 2024, Redaksi TV, Spiral of Silence, YouTube.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of political hoax news on the Redaksi TV YouTube channel in shaping public opinion ahead of the 2024 Indonesian Presidential Election. The research adopts a qualitative approach using interpretative analysis methods, supported by interviews, video content observation, and documentation. The object of the study focuses on a video titled "Perhitungan di Stop KPU dan Istana Kalang Kabut, Kecurangan Terbongkar" uploaded by Redaksi TV, along with audience responses in the form of comments and digital interactions. The findings reveal that the video constitutes fabricated content that spreads disinformation through emotional and visual means, significantly influencing public opinion

formation. Many comments reflect emotional responses, including distrust towards the KPU and Bawaslu, and even extreme demands such as annulling the election. This phenomenon is explained through the Spiral of Silence theory, which highlights how dominant hoax narratives can silence critical opinions. The study underscores that political hoaxes on YouTube not only undermine information quality but also manipulate public perception and pose a serious threat to digital democracy.

Keywords: Political Hoax, Public Opinion, 2024 Election, TV Editorial, Spiral of Silence, YouTube.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kehidupan sosial masyarakat secara signifikan. Internet tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi alat utama dalam mengakses informasi. Di tengah kemudahan ini, muncul persoalan baru berupa penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dikemas menyerupai berita faktual. Informasi semacam ini kerap digunakan untuk menyebarkan propaganda, membentuk opini publik, atau menciptakan polarisasi sosial (Wardle & Derakhshan, 2017).

Wardle dan Derakhshan (2017) mengklasifikasikan hoaks ke dalam kategori gangguan informasi, yang terdiri atas *malinformation* (informasi benar yang disebarluaskan untuk menyakiti), *misinformation* (informasi keliru yang disebarluaskan tanpa niat jahat), dan *disinformation* (informasi keliru yang disebarluaskan dengan niat jahat). Ketiga bentuk ini berdampak negatif terhadap literasi media dan ketahanan informasi masyarakat.

Di Indonesia, YouTube menjadi salah satu platform digital yang berperan besar dalam penyebaran hoaks. Berdasarkan laporan *Digital 2023: Indonesia* dari We Are Social dan Meltwater, YouTube tercatat sebagai platform media sosial paling populer di Indonesia, dengan lebih dari 139 juta pengguna aktif. Fitur algoritma yang mendorong viralitas konten, minimnya verifikasi informasi, serta kemudahan berbagi konten membuat YouTube menjadi lahan subur penyebaran informasi palsu, termasuk dalam bentuk video manipulatif, teori konspirasi, atau berita bohong yang dikemas secara visual menarik (Tandoc et al., 2018).

Penyebaran hoaks melalui YouTube menjadi lebih masif menjelang momentum politik, seperti Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024. Berdasarkan data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (2023), terdapat 2.330 hoaks sepanjang tahun tersebut, dengan 1.292 terkait isu politik dan 645 secara langsung berkaitan dengan

Pemilu 2024. Konten hoaks ini seringkali menyerang personalitas kandidat, menyebarkan narasi keliru tentang latar belakang, agama, dan orientasi politik mereka. Situasi ini berpotensi mengganggu kualitas demokrasi karena publik tidak mendapatkan informasi yang objektif untuk mengambil keputusan politik secara rasional.

Dalam konteks ini, media arus utama seperti televisi memiliki tanggung jawab profesional dan etis untuk mengambil peran aktif dalam melawan hoaks. Redaksi televisi memegang fungsi sebagai *gatekeeper* informasi, yakni memilih dan memverifikasi informasi sebelum disampaikan kepada publik. Beberapa stasiun televisi di Indonesia telah mengembangkan rubrik atau segmen cek fakta dengan menggandeng lembaga seperti Cekfakta.com dan Mafindo. Meskipun demikian, kecepatan penyebaran hoaks di dunia maya masih jauh melampaui kemampuan redaksi dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi.

Masih terdapat celah besar terkait sejauh mana redaksi televisi menyelidiki hoaks yang beredar di YouTube, serta apakah mereka hanya menunggu klarifikasi dari otoritas resmi atau justru bersikap proaktif. Upaya memerangi hoaks tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi yang benar, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan informasi publik dan menumbuhkan kesadaran literasi media di era digital.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana redaksi televisi di Indonesia menangani hoaks politik yang beredar di platform YouTube menjelang Pemilu Presiden 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan literasi media, peningkatan peran jurnalisme profesional di era digital, serta mempertegas posisi media sebagai penopang demokrasi.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis interpretatif untuk mengkaji pengaruh pemberitaan hoaks politik di kanal YouTube Redaksi TV terhadap opini publik menjelang Pemilu Indonesia 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna dan respons masyarakat

terhadap informasi palsu yang tersebar melalui media sosial. Melalui analisis interpretatif, penelitian tidak hanya fokus pada isi video, tetapi juga pada respons audiens yang tampak dalam komentar, interaksi, dan partisipasi digital lainnya (Smith & Osborn, 2003).

Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi pola opini publik serta menafsirkan kecenderungan sikap yang muncul, untuk memahami konstruksi pesan dalam konten hoaks dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik di ranah politik digital (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika hubungan antara konten hoaks yang tersebar di media digital dan pembentukan opini publik dalam konteks politik, khususnya menjelang Pemilu 2024.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penonton dan pengguna YouTube yang berinteraksi dengan video berjudul "Perhitungan di Stop KPU dan Istana Kalang Kabut, Kecurangan Terbongkar" yang diunggah oleh channel REDAKSI TV. Interaksi tersebut mencakup aktivitas menonton, memberikan komentar, memberikan tanda suka (like), membagikan video, hingga mendiskusikannya di platform lain. Pengguna yang aktif berinteraksi dengan konten ini dipilih sebagai subjek penelitian untuk mengkaji persepsi, respon, dan kecenderungan mereka dalam menanggapi narasi yang dibangun melalui video tersebut.

Selain itu, channel REDAKSI TV juga dijadikan subjek penelitian karena berperan penting sebagai pihak yang memproduksi dan menyebarkan narasi politik yang mengandung dugaan hoaks. Channel ini diamati dalam konteks bagaimana ia membentuk wacana, memilih daksi dan visual, serta memframing isu politik selama kampanye Pemilu 2024. Dengan menganalisis baik pembuat konten maupun audiensnya, penelitian ini berupaya memahami dinamika produksi, penyebaran, serta penerimaan narasi hoaks politik di platform YouTube.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif dan paradigma interpretatif, pengumpulan data dibuat dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna-makna sosial. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti: *Pertama*, Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai komunikasi politik, seperti dosen, pakar, atau individu yang mengikuti perkembangan dinamika politik, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali perspektif dan analisis mengenai strategi penyebaran narasi politik yang dilakukan melalui video berjudul "Perhitungan di Stop KPU dan Istana Kalang Kabut, Kecurangan Terbongkar" dari channel REDAKSI TV di platform YouTube. Wawancara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana konten tersebut berkontribusi terhadap pembentukan opini publik dan persebaran hoaks politik di media sosial.

Kedua, Observasi online dilakukan dengan cara mengamati secara langsung konten video berjudul "Perhitungan di Stop KPU dan Istana Kalang Kabut, Kecurangan Terbongkar" dari channel REDAKSI TV di platform YouTube. Observasi ini mencakup analisis terhadap narasi yang disampaikan, penggunaan visual, teks, serta elemen audio visual yang digunakan untuk membentuk persepsi politik penonton. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menangkap dinamika penyampaian pesan politik, teknik framing informasi, serta cara-cara penyusunan pesan yang berpotensi mempengaruhi opini publik melalui media sosial.

Ketiga, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bentuk dokumen terkait, seperti tangkapan layar (screenshot) dari video "Perhitungan di Stop KPU dan Istana Kalang Kabut, Kecurangan Terbongkar", komentar pengguna, artikel berita dari media arus utama, laporan pemeriksa fakta, serta konten digital lainnya yang relevan. Dokumentasi ini berfungsi untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi online, serta memperkuat analisis dalam penelitian dengan menghadirkan bukti-bukti yang dapat memperjelas konteks narasi politik yang berkembang di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Hoaks Politik di YouTube terhadap Opini Publik

Penelitian ini menemukan bahwa kanal YouTube *REDAKSI TV* menyebarkan disinformasi politik menjelang Pemilu Presiden 2024 melalui video berjudul "*Hitungan suara dihentikan!! KPU dan istana panik kecurangan pemilu terbongkar*". Video tersebut menggunakan potongan dari tayangan CNBC Indonesia yang tidak relevan, dikombinasikan dengan narasi tentang penghentian penghitungan suara akibat kecurangan pemilu. Konten ini tergolong sebagai *fabricated content*, yaitu konten sepenuhnya palsu yang sengaja diproduksi untuk menyesatkan publik (Wardle & Derakhshan, 2017).

Video semacam ini memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Banyak komentar di video tersebut yang mencerminkan kemarahan, kecurigaan, bahkan seruan untuk membatalkan pemilu. Ini menunjukkan bahwa informasi palsu yang dikemas secara visual dramatis dan emosional dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi. Temuan ini sejalan dengan riset McDougall et al. (2019), yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital berkontribusi terhadap penyebaran dan penerimaan hoaks di kalangan masyarakat.

Dari sisi teori, fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan teori *Spiral of Silence*, yang menyatakan bahwa individu cenderung diam jika opininya berbeda dari mayoritas. Dalam konteks ini, dominasi narasi hoaks menciptakan ilusi bahwa masyarakat luas mempercayai adanya kecurangan, sehingga individu yang meragukan hoaks justru memilih diam (Webmaster, 2024). Ini memperkuat efek dominasi opini palsu dan melemahkan keberagaman pandangan di ruang publik digital.

Lebih jauh, algoritma YouTube memperparah kondisi ini. Video dengan judul sensasional dan banyak interaksi cenderung direkomendasikan ulang, memperluas jangkauan konten hoaks dan menciptakan *echo chamber* (Admfp, 2024). Hal ini mencerminkan bagaimana platform digital turut andil dalam *agenda setting* digital memfokuskan perhatian publik pada isu tertentu, tanpa mempertimbangkan kebenaran isi pesan.

Implikasi dari temuan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Dalam konteks demokrasi digital, keterpaparan publik terhadap hoaks bisa mengurangi kepercayaan terhadap institusi negara dan membentuk opini publik berdasarkan asumsi keliru. Oleh karena itu, redaksi media dan lembaga pengawas informasi perlu lebih sigap dalam melakukan verifikasi dan edukasi literasi media kepada masyarakat.

Bentuk-Bentuk Hoaks Politik dan Respons Publik

Penelitian ini juga mengidentifikasi dua bentuk hoaks politik dominan dalam konten YouTube Redaksi TV, yaitu: *Pertama*, Fabricated Content Video menyusun narasi palsu dari potongan klip yang tidak relevan (Ramadan & Adnan, 2024). Hal ini tampak dalam video yang mengklaim "penghitungan suara dihentikan karena kecurangan", padahal tidak ada bukti mendukung klaim tersebut. Pak Makroen, narasumber penelitian ini, menyebut video seperti ini sebagai "produk pabrik hoaks" karena narasi yang dibangun sepenuhnya hasil rekayasa dan bertujuan menyesatkan. *Kedua*, Misleading Content Konten mengambil informasi asli tetapi dipresentasikan dalam konteks yang menyesatkan. Potongan dari berita CNBC tentang IKN dimasukkan dalam video untuk mendukung narasi kecurangan pemilu, padahal tidak ada keterkaitan antara isi video asli dan isu yang diangkat.

Respons publik terhadap konten ini sangat emosional. Dari ratusan komentar yang diamati, sebagian besar menunjukkan ketidakpercayaan terhadap KPU dan Bawaslu, bahkan muncul ajakan untuk membubarkan pemilu (Putra & Patra, 2023). Beberapa komentar bernada ekstrem seperti "Kobarkan jihad melawan kecurangan" atau "Pemilu 2024 wajib dibubarkan" menunjukkan bahwa hoaks politik tidak hanya berdampak pada persepsi publik, tetapi juga dapat memicu reaksi sosial dan ideologis yang berbahaya.

Temuan ini konsisten dengan riset Juditha & Darmawan (2024), yang menyoroti bahwa hoaks politik berpotensi menciptakan polarisasi dan krisis legitimasi terhadap institusi demokrasi. Ketika masyarakat mulai memercayai narasi kecurangan yang tidak terverifikasi, kepercayaan terhadap sistem pemilu menjadi rapuh.

Respons semacam ini diperparah oleh rendahnya literasi media. Makroen menegaskan bahwa hanya sekitar 6% masyarakat Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Kondisi ini menjadikan mayoritas masyarakat rentan menerima informasi tanpa proses verifikasi, apalagi jika disajikan dengan gaya visual yang menarik dan emosional.

Polarisasi, Delegitimasi, dan Spiral Keheningan

Dampak lanjutan dari penyebaran hoaks ini adalah polarisasi politik dan delegitimasi proses demokrasi. Hoaks yang dikemas dalam narasi emosional tidak hanya memecah belah opini, tetapi juga membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem (Nurdin, 2024). Komentar-komentar di video yang menuduh pemilu sudah direkayasa, atau menyebut hasil pemilu sebagai formalitas belaka, memperlihatkan bagaimana narasi palsu membentuk *opini publik yang ekstrem*.

Lebih jauh, terdapat juga politisasi agama dalam respons publik, seperti komentar "menang karena kecurangan bukan takdir Allah SWT". Ini mengindikasikan bahwa hoaks politik juga membawa implikasi ideologis dan identitas, yang berpotensi memperbesar konflik sosial berbasis nilai.

Kondisi ini kembali memperkuat relevansi teori Spiral of Silence. Ketika opini publik didominasi narasi palsu, suara-suara kritis akan tenggelam karena takut diserang. Akibatnya, narasi yang salah terus diperkuat, dan ruang publik digital kehilangan keberagaman pendapat. Drew (2022) dalam penelitiannya juga menekankan bahwa dalam era digital, efek spiral keheningan diperkuat oleh algoritma media sosial dan intensitas penyebaran informasi.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori *Spiral of Silence* dalam konteks media baru seperti YouTube. Media sosial tidak hanya memperkuat opini mayoritas melalui eksposur algoritmik, tetapi juga menciptakan ilusi konsensus yang mengintimidasi suara minoritas. Selain itu, temuan ini memperkaya kajian tentang pengaruh disinformasi politik dalam pembentukan opini publik digital di negara demokratis.

Secara praktis, penelitian ini memberikan peringatan tentang pentingnya literasi digital dan peran media arus utama dalam melawan disinformasi. Stasiun televisi dan media digital perlu proaktif dalam melakukan cek fakta, menyampaikan narasi tandingan, serta melibatkan audiens secara edukatif. Pemerintah, akademisi, dan platform digital juga harus bekerja sama memperkuat regulasi dan sistem pelaporan hoaks agar demokrasi digital tidak dikendalikan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kanal YouTube Redaksi TV dalam pemberitaan Pemilu 2024, ditemukan bahwa bentuk hoaks politik yang dominan adalah melalui teknik fabrikasi konten. Video hoaks dikonstruksi dengan menggabungkan potongan-potongan visual yang tidak berkaitan, disertai narasi provokatif dan judul yang sensasional seperti *"Penghitungan di Stop KPU dan Istana Kalang Kabut, Kecurangan Terbongkar"*. Penggunaan elemen visual yang dramatis, thumbnail menarik, dan penyampaian emosional terbukti efektif dalam menarik attensi publik, meskipun substansi informasi yang disampaikan tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hoaks politik di YouTube tidak sekadar disinformasi, melainkan sebuah bentuk manipulasi komunikasi yang terstruktur dan terencana.

Respons publik terhadap hoaks politik di YouTube menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Berbagai komentar dalam video tersebut memperlihatkan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu, serta munculnya beberapa tuntutan ekstrem seperti pembubaran pemilu hingga seruan delegitimasi hasil pemilu. Bahkan, terdapat narasi yang mencampurkan isu politik dengan keyakinan religius, yang memperlihatkan bahwa hoaks tidak hanya membentuk persepsi politik, tetapi juga memengaruhi aspek ideologis masyarakat. Dalam konteks ini, teori *Spiral of Silence* menjadi relevan: individu yang berbeda pandangan cenderung diam karena dominasi opini mayoritas yang terbentuk oleh paparan hoaks secara masif. Akibatnya, suara kritis terhadap narasi hoaks menjadi terpinggirkan, dan opini publik yang terbentuk seolah-olah mewakili konsensus kolektif, padahal bisa jadi hanyalah hasil dari pengulangan informasi menyesatkan.

Dengan demikian, bentuk hoaks politik yang tersebar melalui YouTube tidak hanya mengubah pola komunikasi publik, tetapi juga membentuk opini publik melalui proses sosial yang kompleks. Melalui dominasi wacana dalam komentar, pengaruh algoritma, dan tekanan sosial di ruang digital, opini mayoritas yang terbentuk bisa saja tidak merepresentasikan kebenaran, melainkan hasil dari strategi manipulatif. Teori *Spiral of Silence* menjelaskan bagaimana masyarakat menjadi bagian dari proses pembentukan opini palsu secara kolektif, karena ketakutan terhadap isolasi sosial membuat opini minoritas kehilangan ruang ekspresi. Dalam konteks ini, hoaks politik

menjadi ancaman serius bagi rasionalitas publik dan keberlangsungan demokrasi yang sehat.

REFERENSI

- Admfip. (2024, Desember 3). Pengaruh Algoritma YouTube terhadap Preferensi Konten Edukatif Siswa. Retrieved from fip.unesa: <https://fip.unesa.ac.id/pengaruh-algoritma-youtube-terhadap-preferensi-konten-edukatif-siswa/>
- Drew, M. (2022, Jun 15). "Expanding the Scope of the Spiral of Silence Theory to Increase Relevance the Digital Age". Journal of Student Research at Indiana University East, 4(1), 106. Retrieved Mei 17, 2025, from <https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/jsriue/article/vie w/34203>
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2024, Desember 21). KOMUNIKASI POLITIK TERKAIT HOAKS PADA PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2024. JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA, 28(2), 168. 10.17933/jskm.2024.5682
- McDougall, J., & dkk. (2018). Teaching media literacy in Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education. PPMI Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurdin, R. (2024). TROLLS, DISINFORMASI, DAN STRATEGI KAMPANYE: TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024. Jurnal Tata Kelola PemiluIndonesia.
- Putra, F., & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. Journal of Education & Pedagogy.
- Ramadan, R., & Adnan, M. F. (2024). Analisis Konten Hoaks Via Media Sosial Youtube pada Pelaksanaan Pemilu 2024. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora.
- Smith, J. A., & Osborn, M. (2003). Interpretative phenomenological analysis. In J. A. Smith (Ed.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods (pp. 51-80). SAGE Publications.
- Tandoc Jr., E. C. (2017, Agustus 30). Defining "Fake News": A Typology of Scholarly Definitions. Digital Journalism, 6(2), 137.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Europe: Council of Europe Report.
- Webmaster. (2024, Oktober 6). Mengenal Teori Spiral of Silence: Mengapa Banyak Orang Memilih Diam dalam Diskusi Publik? Retrieved from Stisip Widuri: <https://widuri.ac.id/mengenal-teori-spiral-of-silence-mengapa-banyak-orang-memilih-diam-dalam-diskusi-publik/>